

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Faried. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial dalam bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Indar. 2010. *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djemma, Siardin A. 2008. *Desentralisasi, Otonomi Daerah dan Kinerja DPRD*. Sengkang: Lampena.
- Djemma, Siardin A. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Sengkang: Lampena.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geert Teisman. 1992. *Complex Decision-making, a Pluricentric View*. Hague: Vuga
- Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ismail, Imran. 2012. *Teori Ilmu-ilmu Sosial, Dasar, Konsep, paradigma dan Teori*. Bekasi Utara: Forum IMI
- Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sospol UGM. 2006. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaloh, Johaness. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

- Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini. 1987. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia..
- Mardikanto, Totok dan Purwoko Soebioto, Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung: Alfabeta. 2017
- Malo, Manasse dan Sri Trisnoningtias. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexi J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Oddest, 2014.
- Spreadley dan Faisal (1990)
- Nasir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi, Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta; Rineka Cipta
- _____. 2015. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pasiga, Burhanuddin. 2007. *Metode Praktis Perhitungan Besar Sampel*. Makassar: Bagian Ilmu Kesehatan Gigi masyarakat FKG Unhas
- Putra, Fadillah & Anwar S. 2019. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalime Teori dan Praktik*. Depok: LP3ES
- Salim, Peter. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press
- Sugiyono. 1999. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi, Ph.D. 2015. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkasi masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Supriatna, Tjahya. 1996. *Administrasi Birokrasi dan sPelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Jakarta: PT Grasindo.

- Thoha, Mifta. 2009. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tempe. 2019. Rencana Strategis Kecamatan Tempe 2019-2024. Pemerintah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Sengkang. 162 Hal
- Wibawa, Samudra. 2005. *Reformasi Administrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.
- Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Jurnal

- Abdul Halim dan Syukriy Abdullah. Hubungan dan masalah keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No.1, 2006
- B Guy Peters. *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism.. 3rd*, (New York: The Continuum International Publishing Group, 2012)
- Eko Handoyo. Kebijakan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Belajar dari Kabupaten Tangerang. Prosiding Seminar Nasional UNISBANK (SENDI_U) Ke-2 Tahun 2016.
- Erik Blech, "Historical Institutionalism and Judicial Decision-Making Ideas, Institutions, and Actors in French High Court Hate Speech Rulings" dalam *World Politics*, Volume 70, Number 1, 2018.
- Gabriel Iele, Memahami Etika Birokrasi Publik: Sebuah Diagnosis Institusional. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*. Vol. 2, No.2, November 2008. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN
- Gerard Boychuk, "Studying Public Policy: Historical Institutionalism and the Comparative Method", dalam *Canadian Journal of Political Science*, Volume 49, Number 4, 2017.
- James R Situmorang. Penggunaan Game Theory dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis* (2015), Vol.11, No.2: hal. 160–172,

(ISSN:0216–1249) 2015 Center for Business Studies. FISIP - Unpar

L. Pressman and Wildavsky, *Implementation*, Barkley and Los Angeles, University of California Press, 1973.

Mariandini, F.I dkk. *Institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang*. Jurnal *Economia*, 2014, 14(1)

Nicoleta Lasan, "European Union Intervention in the Iranian Crisis – A Sociological Institutional Perspective." dalam *Romanian Journal of European Affairs (RJE)*, Volume 14, Issue 1, 2014.

Philip Selznick, "Institutionalism 'Old and 'New'", dalam *Administrative Science Quarterly*, Volume 41, Number 2, 1996.

Rahmatullaila. dkk. *Institusionalisasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat*. Habitat Volume XXV, No. 2, Bulan Agustus 2014

Suparman. dkk. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN. 2014.

Vivien A Schmidt, "Does Discourse Matter in the Politics of Welfare State Adjustment?", dalam *Comparative Political Studies*, Volume 35, Issue 2, 2002, hal. 168-193

_____, "Theorizing Ideas and Discourse in Political Science: Intersubjectivity, Neo-Institutionalism, and the Power of Ideas", dalam *Critical Review: A Journal of Politics and Society*, Volume 29, Number 2, 2017, hal. 248-263

Ward, Robert C. 2007. *The Outsourcing of Public Library Management: An Analysis of the Application of New Public Management Theories From the Principal-Agent Perspective*, *Administration and Society*, 38(6), 627-648.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pemerintah Kabupaten Wajo

Peraturan Bupati Wajo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Wajo

Peraturan Bupati Wajo Nomor 115 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Kelurahan di Kabupaten Wajo

Surat Edaran

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 146/2694/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Internet

Purbaya, Angling Aditya. 2019. *Buka Rakernas Apeksi, Mendagri Bahas Dana Kelurahan*. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4609678/buka-rakernas-apeksi-mendagri-bahas-dana-kelurahan?_ga=2.9193841.590128126.1568555130-5558139.1563761709. Diakses pada 15 September 2019

Retorics. 2015. *Pendekatan Institusionalisme*. <http://retorics.blogspot.com/2015/02/pendekatan-institusionalisme.html> Diakses pada tanggal 3 Oktober 2020

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. *Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2019*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>. Diakses pada 26 Oktober 2020.

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Lurah Watallipue, 6 Maret 2020)



(Wawancara dengan Tim Penyelenggara Kelurahan Teddaopu, 17 Maret 2020)